

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yang disebabkan karena perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Mengacu pada hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan capaian Triwulan I Tahun 2017, percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional tahun 2017, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional tahun 2017.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2017 adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS); dan
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2017.

Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2017 adalah:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016;
2. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2017; dan
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran baik dari Pusat maupun Provinsi.

3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2017 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2017, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan
5. Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

5.31 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyesuaian beberapa indikator makro perekonomian antara lain:

a. **Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pendapatan Domestik Regional Bruto Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 11,37% per tahun. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 5,80% per tahun.

Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2011 sampai Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat, tabel berikut:

Tabel I.1.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 Tahun Dasar 2010

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Rp juta)	(%) perubahan	Nilai (Rp juta)	(%) perubahan
2011	15.561.176,40	13,41	14.592.026,30	6,34
2012	16.987.107,95	9,16	15.369.974,36	5,33
2013	18.806.295,97	10,71	16.266.498,68	5,83
2014	21.068.013,46	12,03	17.174.347,03	5,58
2015	23.495.135,18	11,52	18.189.698,21	5,91

Rata-rata	19.183.545,79	11,37	16.318.508,915	5,80
-----------	---------------	-------	----------------	------

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

b. Pertumbuhan Ekonomi

Rata-rata kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,66, sedangkan untuk Tahun 2016 diprediksikan mengalami kenaikan menjadi 5,4-5,6 dari semula 5,44 pada Tahun 2015. Kondisi tersebut didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik yang didukung dengan relatif terjaganya daya beli masyarakat dan tetap tingginya kegiatan investasi yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pembangunan sarpras investasi, upah tenaga kerja yang masih kompetitif di Kabupaten Boyolali. Perkembangan pertumbuhan ekonomi, prediksi, dan target terlihat seperti pada Tabel I.2.

Tabel I.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pertumbuhan ekonomi
1	2011	3,35
2	2012	3,45
3	2013	5,48
4	2014	5,44
5	2015	5,40-5,60

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

c. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Boyolali cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik yang berdampak kenaikan harga bahan pokok di pasar yang berdampak kenaikan dan faktor eksternal lainnya. Adapun perkembangan inflasi di Boyolali seperti pada Tabel I.3 berikut:

Tabel I.3.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2016

No.	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bahan Makanan	6,21	16,62	15,41	4,34	6,27
2.	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok dan tembakau	4,30	3,04	3,25	4,82	3,91
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas	2,01	3,25	6,44	2,41	2,01
4.	Sandang	3,23	5,06	3,52	1,77	2,25
5.	Kesehatan	1,86	4,46	2,90	3,81	1,77
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	1,38	0,83	4,43	3,45	2,47
7.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa	0,87	12,94	10,21	-2,72	-2,12
Umum		3,45	8,21	7,45	2,58	2,65

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali.

d. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh di Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4
Indeks Gini Tahun 2011-2015 Kabupaten Boyolali

No.	Tahun	Indeks Gini
1	2011	0,36
2	2012	0,38
3	2013	0,40
4	2014	0,38
5	2015	0,35

Sumber : BPS Jawa Tengah

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja,

setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja.

Besarnya serapan angkatan kerja atau tingkat partisipasi penduduk terhadap pembangunan dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang secara aktif bekerja maupun yang belum bekerja tapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator lain yang sering dipakai untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Boyolali mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.5
Perkembangan TPAK dan TPT
di Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2011	73,16	5,81
2	2012	74,84	4,43
3	2013	75,85	5,44
4	2014	74,82	5,46
5	2015	74,68	4,95

Sumber: BPS Jawa Tengah

f. Kemiskinan

Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel I.6
Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Tahun	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1	2011	14,97
2	2012	13,88
3	2013	13,27
4	2014	12,36
5	2015	12,45

Sumber Data : BPS Kabupaten Boyolali.

Data kemiskinan makro/agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, bidang pendidikan melalui bantuan beasiswa keluarga miskin dan masyarakat rentan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, membutuhkan informasi tentang siapa dan di mana penduduk miskin itu berada (*by name* dan *by address*).

g. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2014 sebesar 105, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2013 sebesar 104, sedangkan di Tahun 2015 naik menjadi 106. Mengacu pada kondisi perekonomian yang berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian, NTP pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar 105-107.

Secara umum perkembangan ekonomi makro Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.7
Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi Boyolali
Tahun 2013 – 2016

No	Indikator	2013	2014	2015	2016*
1.	PDRB :				
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	18,806	21,068	23,495	26,038

	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	16,266	17,147	18,189	19,140
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,48	5,44	5,48	5,4-5,6
3.	Inflasi (%)	8,21	7,45	2,58	5,5-6,0
4.	Indeks Gini	0,40	0,38	0,35	0,3-0,4
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,44	5,46	4,95	4,37
6.	Kemiskinan	13,27	12,36	12,45	11,95-12,05
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104	105	106	105-107

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali.

*) angka prediksi

5.g.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

5.g.2.1 Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Kenaikan pendapatan Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata sebesar 9,20%, yang secara dinamis mengalami kenaikan per tahunnya. Kenaikan pada periode tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan Kabupaten Boyolali dari semula Rp1.937.150.203.967,00 pada Tahun 2015 menjadi Rp1.993.471.621.562,00 pada Tahun 2016, dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp2.110.492.356.000,00 pada Tahun 2017. Sedangkan untuk perhitungan Perubahan APBD 2017 diprediksikan mengalami peningkatan sebesar Rp52.537.783.000,00 dari asumsi target pendapatan pada APBD 2017 atau naik kurang-lebih 2,49%.

Peningkatan pendapatan tersebut, dialokasikan pada belanja yang mendukung capaian prioritas pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2017. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2017 antara lain:

1. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 diasumsikan bisa melebihi realisasi Tahun 2016.
2. Dana Perimbangan diasumsikan tidak berkurang dari Tahun 2016, bahkan diharapkan mengalami kenaikan.
3. Rumus Baku Penentuan Kenaikan dan Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada perhitungan Alokasi Dasar ditambah celah fiskal yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- Alokasi Dasar : Kebutuhan aparaturn daerah.
- Celah Fiskal : Kemampuan keuangan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah.
- Komponennya adalah :- Data jumlah penduduk yang valid;
 - Indeks pembangunan manusia;
 - Indeks kemahalan konstruksi;
 - PDRB

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2017 adalah:

- a) diperkirakan ada peningkatan wajib pajak baru;
- b) semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
- c) intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- d) turunnya penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi;
- e) berkurangnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Proyeksi rencana kebijakan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel I.8 berikut ini:

Tabel 1.8
 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali
 Tahun 2015 s.d Tahun 2017

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2017 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Thn 2017 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	260.633.637	292.286.541	260.593.837	341.314.237
1.1.1	Pajak daerah	76.861.736	84.362.391	74.186.500	74.186.500
1.1.2	Retribusi daerah	31.065.824	14.803.307	14.723.377	14.723.377
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.282.461	9.344.479	11.632.060	11.632.060
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.423.615	183.776.362	160.051.900	238.772.300
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.092.341.267	1.358.444.509	1.400.111.659	1.401.780.808
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.288.695	46.125.444	45.606.961	47.276.110

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2017 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Thn 2017 (Rp. 000)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	968.089.632	1.032.744.010	1.032.744.010	1.032.744.010
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	88.962.940	279.575.054	321.760.688	321.760.688
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	584.175.298	342.740.570	449.786.860	419.935.094
1.3.1	Hibah	21.958.312	15.000.000	11.168.360	11.168.360
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	106.801.964	107.894.687	120.556.279	111.986.877
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	413.125.282	167.801.074	261.922.667	261.922.667
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	42.289.739	52.044.809	56.139.554	34.857.190
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	1.937.150.203	1.993.471.621	2.110.492.356	2.163.030.139

e)g.22 Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Secara umum Komposisi Belanja Kabupaten Boyolali dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2017 didominasi oleh belanja pegawai, begitu juga untuk asumsi pada perubahan Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja pegawai sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali memprioritaskan belanja wajib, khususnya belanja pegawai. Kenaikan Belanja pegawai didominasi oleh belanja tunjangan Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi. Belanja hibah tidak mengalami peningkatan.

Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 diperkirakan sejumlah Rp2.273.721.467.258,00 naik sejumlah Rp131.564.026.000,00 atau 6,14% dari Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp2.142.157.436.000,00.

Dalam belanja langsung akan didominasi oleh belanja modal yang merupakan dampak dari kebijakan pengelolaan belanja yang

diarahkan pada peningkatan proporsi belanja modal. Pada Perubahan RKPD Tahun 2017 kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam belanja utamanya untuk mencukupi kekurangan Jamkesda, belanja yang bersifat *in out* dikarenakan kenaikan pendapatan seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyudono, RSUD Simo dan Dinkes, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), penjabaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Alokasi Khusus (DAK), serta usulan prioritas dari Organisasi Perangkat Daerah.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah Tahun 2015-2017 tersaji dalam Tabel 1.9 berikut ini:

Tabel.1.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2015 s.d Tahun 2017

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2016 (Rp. 000)	Tahun Berjalan 2017 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Thn 2017 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	954.269.355	990.782.325	917.348.268	956.520.334
2.1.4	Belanja hibah	57.720.025	23.365.711	38.282.915	36.561.390
2.1.5	Belanja bantuan social	8.313.969	10.147.775	13.950.000	13.950.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa	8.197.128	8.897.316	8.890.988	8.890.988
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa	177.147.084	318.340.179	344.156.222	352.410.588
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	-	2.050.000	2.050.000
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.205.647.561	1.351.533.307	1.324.678.393	1.370.383.301
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	39.800.939	63.318.185	66.932.971	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	277.143.494	268.514.703	338.676.582	
2.2.3	Belanja modal	310.175.465	373.915.606	411.869.490	
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	627.119.898	705.748.495	817.479.043	903.338.166
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.832.767.460	2.057.281.803	2.142.157.436	2.273.721.467

e)g.23 Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2015-2017 utamanya didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA). SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan apabila terjadi defisit anggaran. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya SiLPA sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Dengan demikian keberadaan SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam era ekonomi dan desentralisasi fiskal sekarang ini pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian dalam manajemen dana dan manajemen investasi agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misi dan motivasi kegiatan investasi atau penyertaan modal tidak hanya semata-mata menambah penerimaan daerah namun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik.

Struktur realisasi dan prediksi pembiayaan daerah pada Tahun 2015-2017 tersaji pada Tabel I.10 berikut ini.

Tabel I.10

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali

Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015 (Rp. 000)	Realisasi Tahun 2016(Rp. 000)	Tahun Berjalan 2017 (Rp. 000)	Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2017 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	162.441.048	235.755.397	64.056.570	143.082.813
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	261.114	261.114	261.114	261.114
3.1.7	Penerimaan Titipan Uang Jaminan	-	108.483	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.702.163	236.124.995	64.317.684	143.343.927
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	29.353.000	29.232.000	29.544.789	29.544.789
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	2.000.000	-	3.000.000	3.000.000
3.2.7	Pengembalian Titipan Uang Jaminan	-	-	107.815	107.815
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.353.000	29.232.000	32.652.604	32.652.604
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	131.349.163	206.892.995	31.665.080	110.691.323

1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017

Prioritas dan fokus sasaran pembangunan Perubahan RKPD 2017 meliputi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2017 yang diarahkan untuk membangun iklim yang semakin kondusif bagi pertumbuhan dan perluasan investasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*). Komitmen tersebut perlu dukungan payung hukum regulasi daerah yang bersifat mengikat fokus alokasi anggaran. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi daya dukung masuknya investor. Selain fokus tahun pertama, agenda pembangunan juga tetap menangani urusan rutin dan pelayanan publik yang terus menerus berlangsung. Jadi program prioritas Tahun 2017 adalah yang

mendukung:

1. Penyediaan regulasi daerah ramah investasi dan peningkatan skema KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Program Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan pemenuhan kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur *E-governance* untuk mendukung prioritas *Smart City*;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
5. Peningkatan produksi pertanian, peternakan/perikanan dan pemasaran hasil untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan; dan
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2017 arah kebijakan yang dikembangkan adalah:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan;
5. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif; dan
6. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah

dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi.